

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar belakang masalah

Fenomena kualitas laporan keuangan pemerintah di Indonesia merupakan suatu hal yang menarik untuk dikaji lebih lanjut. Seiring dengan perkembangan akuntansi sektor publik di Indonesia, maka wujud pertanggung jawaban kepada masyarakat atas kinerja pemerintah menjadi suatu tuntutan yang umum. Fenomena yang terjadi dalam perkembangan sektor publik di Indonesia adalah menguatnya tuntutan atas kualitas informasi laporan keuangan pemerintah (Nurillah, 2014). Para pemangku kepentingan memerlukan informasi-informasi yang bermanfaat dan memiliki nilai untuk digunakan dalam pengambilan keputusan (Suwardjono, 2005). Informasi yang bermanfaat adalah informasi yang dapat digunakan oleh para pemangku kepentingan dalam melakukan pengambilan keputusan.

Perkembangan sektor publik di Indonesia saat ini ditandai dengan menguatnya tuntutan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintah yang baik. Hal ini mendorong pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk menerapkan akuntabilitas publik. Tujuan organisasi sektor publik sendiri berbeda dengan organisasi sektor swasta. Sudut pandang ilmu ekonomi, sektor publik dapat dipahami sebagai suatu entitas yang aktivitasnya berhubungan dengan usaha untuk menghasilkan barang dan pelayanan publik Ulum (2004) dalam Nurillah (2014).

Laporan keuangan pemerintah dapat memenuhi kualitas yang dikehendaki haruslah memiliki keempat karakteristik kualitatif diatas sebagai prasyarat normatif yang perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi sehingga dapat memenuhi tujuannya. Kualitas laporan keuangan akan meningkatkan kualitas informasi yang disajikan dalam laporan keuangan.

Para pengguna laporan keuangan yakin dalam mengambil keputusan karena didasarkan pada informasi yang telah dipersiapkan dengan baik, disetujui, dan diaudit secara transparan, dapat dipertanggungjawabkan dan berkualitas. Kualitas laporan keuangan adalah sejauh mana laporan keuangan menyajikan informasi yang benar dan jujur. Hal ini berarti bahwa kualitas laporan keuangan menunjukkan konsep kualitas informasi dari laporan tersebut.

Salah satu faktor utama yang dapat meningkatkan kualitas informasi laporan keuangan adalah kompetensi sumber daya manusia yang masih mengalami kendala dalam proses penyusunannya. Permasalahan yang paling mendasar dalam penyusunan laporan keuangan adalah SDM (Sumber Daya Manusia) pada masing-masing SKPD, dalam hal ini adalah aparatur daerah. Kenyataannya, banyak pihak yang bertanggungjawab terhadap pembuatan laporan keuangan bukanlah orang yang berlatar belakang pendidikan akuntansi. Kompetensi sumber daya manusia berperan dalam menciptakan laporan keuangan yang berkualitas. Kurangnya keahlian yang dimiliki serta rendahnya kompetensi yang dimiliki akan berdampak pada kualitas laporan keuangan yang dihasilkan serta dikhawatirkan akan adanya kekeliruan pada proses penyusunan laporan keuangan tersebut (Soimah, 2014). Penelitian oleh (Nurriah, 2014) menunjukkan hasil kompetensi sumber daya manusia berpengaruh positif pada kualitas laporan

keuangan. Kompetensi sumber daya manusia yang baik akan dapat menciptakan kualitas laporan keuangan yang baik pula.

Adanya sistem pengendalian internal yang baik diharapkan dapat meningkatkan keandalan data akuntansi yang dihasilkan (Warren *et al.* 2005). Melalui sistem pengendalian internal yang baik juga akan mengurangi resiko adanya kekeliruan maupun kesalahan-kesalahan dalam penyusunan laporan keuangan sehingga mampu menciptakan kualitas laporan keuangan yang baik. Sistem pengendalian internal yang dirancang dengan baik juga harus sejalan dengan bagian-bagian dan fungsi-fungsi terkait yang dapat berintegrasi dengan masing-masing tugas dan tanggung jawabnya sehingga sistem yang telah dirancang dapat berjalan dengan baik pula. Adanya penyimpangan-penyimpangan serta masih adanya opini “tidak wajar dan/atau *disclaimer*” dapat disebabkan oleh lemahnya sistem pengendalian internal pemerintah terkait (Nurillah, 2014). Penelitian oleh (Nurillah, 2014) menemukan hasil sistem pengendalian internal berpengaruh pada kualitas laporan keuangan.

Pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas informasi laporan keuangan Pemerintah Daerah. Hasil temuan ini sejalan dengan Desi dan Ertambang (2008), Rahmawati (2010), Sukmaningrum (2012), Zuliarti (2012), dan Aryani (2013). Pemanfaatan teknologi informasi yang meliputi teknologi komputer dan teknologi komunikasi dalam pengelolaan keuangan daerah akan meningkatkan pemrosesan transaksi dan data lainnya, keakurasian dalam perhitungan, serta penyiapan laporan dan output lainnya lebih tepat waktu. Hal tersebut akan membantu pemerintah dalam

menangani peningkatan volume transaksi dari tahun ke tahun yang semakin kompleks.

Berdasarkan hasil penelitian-penelitian sebelumnya, maka dilakukan penelitian kembali dengan judul “analisis faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas informasi laporan keuangan pemerintah daerah (studi empiris pada pemerintah kabupaten kudus) “.peneliti ini dilakukan pada organisasi perangkat daerah di pemerintahan kabupaten kudus. Alasan peneliti ini tertarik melakukan penelitian di wilayah kabupaten kudus karena laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) kabupaten kudus dari tahun 2013-2018 memperoleh opini wajar tanpa pengecualian (WTP) dari badan pemeriksa keuangan (BPK).dijelaskan bahwa untuk memperoleh penghargaan opini WTP terdapat empat unsur penilaian yang mendapat perhatian pemkab,meliputi kesesuaian laporan keuangan dengan standar akuntansi pemerintahan (SAP) ,kecukupan pengungkapan ,kepatuhan terhadap perundang-undangan ,dan efektifitas sistem pengendalian internal .dari unsu-unsur inilah yang menjadikan pemerintah kabupaten kudus memperoleh opini WTP.

Opini WTP merupakan bukti laporan keuangan kabupaten kudus sudah baik atau akuntabel. Penghargaan opini WTP bagi kabupaten kudus juga merupakan suatu apresiasi (BPK) atas kinerja pemerintah yang menyajikan laporan keuangan sesuai dengan standar akuntansi pemerintah,dan efektifitas sistem pengendalian internal.(jatengprov.go.id).

1.2. Ruang lingkup masalah

Ruang lingkup penelitian merupakan pembatasan atas suatu pembahasan. Hal ini dimaksudkan agar arah pembatasan dalam penulisan penelitian ini tidak meluas serta menghindari adanya kesalah pahaman sehingga tidak menyimpang dari materi pokok. Agar penulisan penelitian dapat mudah dipahami oleh pembaca, penulis hanya meneliti di kabupaten kodus.

1.3. Rumusan masalah

Pertanyaan penelitian yang melandasi penelitian ini antara lain :

1. Bagaimana pengaruh kompetensi Sumber daya manusia berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah ?
2. Bagaimana pengaruh pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan daerah ?
3. Bagaimana pengaruh sistem pengendalian internal berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan daerah ?
4. Bagaimana pengaruh kompetensi sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi ,dan sistem pengendalian internal simultan terhadap kualitas laporan keuangan daerah?

1.4. Tujuan penelitian

Berdasarkan perumusan masalah yang diuraikan diatas, maka penelitian ini mempunyai tujuan sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis pengaruh kompetensi Sumber daya manusia terhadap kualitas pelaporan keuangan di Kabupaten Kudus.

2. Untuk menganalisis pengaruh pemanfaatan teknologi informasi terhadap kualitas informasi LKPD di Kabupaten Kudus.
3. Untuk menganalisis pengaruh sistem pengendalian intern terhadap kualitas informasi LKPD di Kabupaten Kudus.
4. Untuk menganalisis pengaruh kompetensi sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi, dan sistem pengendalian intern berpengaruh simultan terhadap kualitas informasi LKPD di kabupaten kudus.

1.5. Manfaat penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan bermanfaat sebagai :

A. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian diharapkan dapat mengembangkan literatur-literatur akuntansi yang sudah ada, dan memperkuat penelitian sebelumnya yaitu berkaitan dengan analisis faktor yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan daerah.

B. Manfaat Praktis

Bagi pemerintah daerah, sebagai wawasan tentang pengaruh Sumber Daya Manusia, pemanfaatan teknologi informasi dan Sistem Pengendalian Internal terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Bagi akademisi penelitian ini memberikan kontribusi untuk penelitian-penelitian selanjutnya.